

Modul-1

Etika dan Nilai kemanusiaan

(I Gede AB Wiranata)

A. Pendahuluan

Etika, dalam bahasa Latin disebut *ethos* atau *ethikos*. Kata ini merupakan bentuk tunggal sedangkan dalam bentuk jamak adalah *ta etha*. Istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan *mores*, *mos*, yang juga berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan” yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral. Bertolak dari arti demikian, etika berkembang menjadi studi tentang berbagai kebiasaan manusia berupa kebiasaan dalam konvensi/kesepakatan di antaranya dalam berbicara, berbusana, bergaul dan lain sebagainya. Studi tentang etika lebih menekankan kepada perbuatan yang dilandasi oleh tatanan nilai kodrat manusia yang tercermin dalam manifestasi kehendak, bukan kebiasaan semata-mata.

Persoalan mengenai etika tidak hanya merupakan ungkapan dan kerisauan para penstudi di kalangan akademik semata. Hampir seluruh lapisan masyarakat rasanya tidak asing dengan penggunaan istilah “etik”, “etis”, bahkan “moral”. Ungkapan kekecewaan berupa bias perilaku sebagai akibat maraknya tayangan televisi dan mass media misalnya, sering kita dengar keluhan seperti “tidak etis”, “tidak bermoral”, dll. Beberapa tahun terakhir kajian tentang etika dirasakan kian marak. Sejumlah pemikiran oleh beberapa penulis baik karya asli maupun terjemahan dalam bentuk pustaka juga membanjiri toko-toko buku. Kepesatan demikian di satu sisi adalah keuntungan bagi pengembangan kajian etika, namun di sisi lain harus dicermati perlunya pemahaman yang tepat, benar dan secara mendasar menyangkut kemungkinan kerancuan istilah dan konsep dasar yang dipergunakan.

Universitas Lampung sebagai sebuah institusi besar bahkan telah membulatkan tekadnya melakukan studi dan kajian khusus terhadap mahasiswanya dalam bentuk pemberian materi khusus pendidikan etika dan kearifan lokal bagi semua program studi di semua fakultas.

B. Kompetensi dasar

Setelah menyelesaikan bahan kajian ini mahasiswa dapat:
Mengaplikasikan Etika dan nilai kemanusiaan.

C. Kemampuan akhir yang diharapkan

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa memiliki wawasan dan pemikiran ilmiah, soft skills, etika dalam perspektif lokal, nasional, dan global, menjadi sosok pribadi unggul dan kompetitif yang berkarakter.

D. Kegiatan Belajar

Kegiatan Belajar 1. Konsep Dasar Etika dan Nilai Kemanusiaan

Pengertian Etika

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “Ethos” yakni adat atau kebiasaan; watak; kesusilaan; sikap; cara berpikir; akhlak. Kajian tentang etika sesungguhnya telah dimulai oleh Aristoteles. Kepada anaknya Nikomachus, Aristoteles menulis sebuah buku dengan judul *Ethika Nicomacheia*. Aristoteles ingin menyampaikan pesan moral kepada anaknya adalah bagaimana tata pergaulan, rupa-rupa penghargaan manusia satu terhadap manusia lainnya. Tata pergaulan ideal antar manusia seyogyanya didasarkan atas kepentingan orang banyak (altruistis) bukan kepentingan egois individual semata-mata. Perhubungan ideal manusia dengan sesamanya akan langgeng begitu juga kehidupan bermasyarakat karena pada dasarnya manusia itu adalah *zoon politicon* – manusia yang selalu ingin hidup secara bersama-sama.

Kata etika dalam bahasa Indonesia umum kurang lazim digunakan. Biasanya istilah yang dipergunakan adalah susila atau kesusilaan. Kata ini berasal dari akar kata bahasa Sansekerta “su” yang berarti baik, indah dan “sila” yang berarti dasar, kelakuan. Kesusilaan bermakna sebagai tatanan kelakuan yang baik dalam wujud kaidah, norma dan aturan yang menjadi dasar pergaulan manusia dalam kehidupan sosial masyarakat.

Terdapat banyak definisi tentang etika. Beberapa di antaranya dikemukakan sebagaimana rumusan di bawah ini:

- a. WJS Poerwadarminta (1986): Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989): yang dimaksud dengan Etika adalah
 - a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral;
 - b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
 - c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
- c. A. Sonny Keraf (1991): Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.
- d. Ensiklopedi Indonesia (1984) Etika (berasal dari bahasa Inggris *ethics*) mengandung arti ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat mengenai: Apa yang baik dan apa yang buruk serta segala ucapan harus senantiasa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan tentang peri keadaan hidup dalam arti kata seluas-luasnya.

- d. Verkuyl (R. Pasaribu; 1988) Etika berasal dari kata *ethos*, yang dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan bathin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan.
- e. James J. Spillane SJ (Budi Susanto; 1992) Etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan putusan moral. Etika mengerahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individu dengan obyektivitas guna menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkahlaku seseorang terhadap orang lain.
- f. Fransz Magnis-Soeseno (2001) Etika bukanlah semata-mata ajaran moral. Dengan ajaran moral dimaksud ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu yang berusaha untuk mengerti mengapa, atas dasar apa kita harus hidup menurut norma-norma tertentu.
- g. A. Fagothey (1953) Etika adalah studi tentang kehendak manusia, yaitu kehendak yang berhubungan dengan keputusan tentang yang benar dan yang salah dalam tindak perbuatan manusia berhubungan dengan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai hubungan antar manusia.
- h. K. Bertens (2001) Etika sekurang-kurangnya dapat berupa tiga arti sbb:
 - a. Sistem nilai Etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sebagai sistem nilai ia terdapat dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat, misalnya Etika orang Jawa, Etika agama Budha.
 - b. Kumpulan asas atau nilai moral Yang dimaksud di sini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia.
 - c. Ilmu tentang yang baik atau yang buruk Etika baru menjadi ilmu, bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat yang sering tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistimatis dan metodis. Arti etika di sini sama dengan filsafat moral.
- i. Sumaryono (1995) Dengan melihat etika berasal dari akar kata bahasa Yunani *ethos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik, etika berkembang menjadi suatu studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi suatu studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia.
- j. Jacques P. Thiroux (1990) menyatakan bahwa etika adalah: “.....*deals with what is right or wrong in human behavior and conduct. It asks such questions as what constitutes any person or action being good, bad, right, or wrong, and how do we know (epistemology)? What part does self-*

interest or the interests of others play in making moral decisions and judgments? What theories of conduct are valid or invalid and why? Should we use principles or rules or laws, or should we let each situation decide our morality? Are killing, lying, cheating, stealing, and sexual acts right or wrong, and why or why not?"

- k. Microsoft Encarta Encyclopedia Reference Library 2010 DVD-ROM Edition *Ethics* (Greek *ethika*, from *ethos*, "character", "custom"), principles or standards of human conduct, sometimes called morals (Latin *mores*, "customs"), and, by extension, the study of such principles, sometimes called moral philosophy. This article is concerned with ethics chiefly in the latter sense and is confined to that of Western civilization, although every culture has developed an ethic of its own. Ethics, as a branch of philosophy, is considered a normative science, because it is concerned with norms of human conduct, as distinguished from the formal sciences, such as mathematics and logic, and the empirical sciences, such as chemistry and physics.
- l. Grolier Encyclopedia 2000 Deluxe CD-ROM Edition *Ethics*, or moral philosophy, the branch of philosophy concerned with conduct and character, is the systematic study of the principles and methods for distinguishing right from wrong and good from bad. Ethics has various interconnections with other branches of philosophy, such as metaphysics, the study of reality, and epistemology, the study of knowledge; this may be seen in such questions as whether there is any real difference between right and wrong and, if there is, whether it can be known.
- m. New Masters Pictorial Encyclopedia (2003) *Ethics* is the science of moral philosophy concerned not with fact, but with values; not with the character of, but the ideal human conduct.
- n. Dictionary of Educational Ethics the study of human behavior not only to find the truth of things as they are but also to aspire into the worth or goodness of human action.
- o. Encyclopedia Britannica Ultimate Reference 2012 DVD-ROM Edition *Ethics* also called moral philosophy. The discipline concerned with what is morally good and bad, right and wrong. The term is also applied to any system or theory of moral values or principles. Ethics deals with such questions at all levels. Its subject consists of the fundamental issues of practical decision making, and its major concerns include the nature of ultimate value and the standards by which human actions can be judged right or wrong. Although ethics has always been viewed as a branch of philosophy, its all-embracing practical nature links it with many other areas of study, including anthropology, biology, economics, history, politics, sociology, and theology. Yet, ethics remains distinct from such disciplines because it is not a matter of factual knowledge in the way that the sciences and other branches of inquiry are. Rather, it has to do with determining the nature of normative theories and applying these sets of principles to practical moral problems.

Dari beragam pemakaian dan pengertian etika di atas, tampak bahwa etika senantiasa terkait dengan konsep ideal yang memuat tatanan etik dalam pergaulan

yang melandasi tingkah laku untuk mewujudkan tata hubungan pergaulan manusia berdasarkan kepada asas-asas baku, ideal dan penuh harmonisasi bila dilaksanakan. Etika merupakan filsafat moral yaitu pemikiran yang dilandasi oleh rasional, kritis, mendasar, sistematis dan normatif. Dalam konteks profesionalisme, etika memberikan jawaban dan sekaligus pertanggungjawaban tentang ajaran moral, yaitu bagaimana seseorang yang berprofesi harus bersikap, berperilaku dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari beragam definisi etika tersebut di atas, dapat pula diketahui bahwa etika berhubungan dengan empat hal sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Membahas tentang baik dan buruknya tingkah laku dan perbuatan manusia.^[5]
- b. Dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolute dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan dan sebagainya.
- c. Dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina dan sebagainya. Dengan demikian etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia.
- d. Dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relative yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman.

Dengan ciri-cirinya yang demikian itu, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Perbuatan baik atau buruk dapat dikelompokkan kepada pemikiran etika, karena berasal dari hasil berfikir. Dengan kata lain etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia.

Etika sebagai ilmu pengetahuan

Pokok pangkal etika adalah perbuatan baik dan benar. Model studinya sama dengan penyelidikan yang digunakan filsafat, oleh karena itu etika adalah filsafat moral, sebagai bagian dari filsafat. Telah dikemukakan di atas etika adalah bagian atau percabangan dari filsafat, yaitu filsafat moral. Di sisi lain etika juga adalah merupakan sebuah ilmu pengetahuan sebagaimana De Vos (1987) menyatakan, etika adalah ilmu pengetahuan tentang moral. Dari pernyataan singkat ini timbul pertanyaan, antara lain: apakah ilmu pengetahuan itu? Apakah moral itu? Kedua pertanyaan mendasar ini akan diuraikan terlebih dahulu sebagaimana di bawah ini.

Menurut Ensiklopedia Indonesia, ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari pelbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu lapangan pengalaman tertentu, yang disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu, hingga menjadi kesatuan, suatu sistem dari pelbagai pengetahuan yang didapatkan sebagai hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan

memakai metode tertentu (induksi, deduksi). Kata ilmu merupakan terjemahan dari “science” berasal dari kata Latin “*Scinre*”, artinya “to know”.

Setiap ilmu pengetahuan dapat bertitik tolak dari mana saja selama sebuah ilmu itu memiliki postulat tertentu. Postulat menurut pemahaman Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998) merupakan asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya atau disebut juga anggapan dasar, patokan duga, aksioma. Berdasarkan rumusan demikian, maka postulat itu lebih bersifat pengandaian sehingga tidak perlu dibuktikan karena telah diakui kebenarannya.

Menurut Soemaryono (1995) ada tiga postulat atau kebenaran filosofis yang menopang segala sistem etika, yaitu:

- a. Keberadaan Tuhan Jika Tuhan tidak ada, maka tidak akan ada kebaikan tertinggi. Tuhan selain sebagai pencipta seru sekalian alam, maka Tuhan juga menjadi tujuan akhir perjalanan hidup manusia;
- b. Kebebasan Kehendak Kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang mutlak pada manusia. Meskipun memiliki kebebasan kehendak, manusia memiliki keharusan untuk bertanggungjawab. Apapun yang diperbuatnya sebagai perwujudan kehendak bebas, satu-satunya yang dapat membebaskan hanyalah bilamana perbuatan itu dilakukan sebagai satu-satunya perbuatan yang tidak mungkin untuk tidak dilakukannya. Misalnya manusia membunuh adalah perbuatan dilarang. Namun membunuh yang karena satu-satunya jalan terakhir untuk pembelaan diri dan sama sekali tidak ada alternative lain, adalah dibolehkan dan dibebaskan dari mekanisme pertanggung jawaban;
- c. Keabadian Jiwa Jika jiwa manusia itu tidak merupakan roh yang hidup sesudah kehidupan ini, maka tidak akan ada motivasi memadai untuk melakukan tindakan yang benar dan menghindari yang tidak benar, mengingat bahwa tindakan keutamaan sering tidak mendapatkan imbalan setimpal dan kecurangan tidak dihukum sebagai mana mestinya di dunia ini. Mengapa kita harus berbuat kebaikan atau menjadi baik, terutama pada saat-saat sulit dalam perjalanan hidup kita, jika hal itu tidak mengandung suatu makna?

Etika sebagai ilmu pengetahuan, pemahamannya dapat diklasifikasikan dalam tiga pendekatan (K. Bertens: 2001):

- a. Etika deskriptif berkenaan dengan gejala-gejala moral atau tingkah laku manusia dalam arti luas. Gejala-gejala ini dijelaskan oleh sejarah moral dan fenomenologi moral. Sejarah moral menyelidiki hal-hal baik dan buruk mana yang pernah berlaku, cita-cita moral manakah yang dianut; bagaimana penerimaan norma atau cita-cita moral oleh bangsa atau lingkungan kebudayaan yang berlainan; perubahan-perubahan apakah yang dialami oleh moral dalam perjalanan waktu; hal-hal apa yang mempengaruhinya, dsb. Karena etika deskriptif hanya melukiskan, maka ia tidak memberikan penilaian. Suatu norma yang digambarkannya, tidak akan dilihat atau diperiksa apakah suatu norma itu benar atau salah. Penggambaran etika deskriptif yang cenderung hanya melukiskan saja, menyebabkan etika ini lebih dikenal dengan pengetahuan empiris dan

bukan filsafat. Saat ini etika deskriptif banyak dijalankan oleh ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, sejarah, dan sebagainya;

- b. Etika normatif terkait dengan sifat hakiki moral manusia. Dalam perilaku dan tanggapan moral, manusia menjadikan norma-norma moral sebagai panutannya. Dasar panutannya yang dilihat hanya fakta, tidak mempersoalkan benar tidaknya norma-norma. Menurut etika normatif manusia hanya menggunakan norma-norma sebagai panutan, tetapi tidak menanggapi kelayakan ukuran moral. Sah tidaknya norma-norma tidak dipersoalkan, yang diperhatikan hanya keberlakuannya;

Berbeda dengan etika deskriptif, etika normatif harus melibatkan diri dengan memberikan penilaian tentang perilaku manusia. Di sini sudah ada pendapat untuk menerima atau menolak sebuah fenomena moral yang terjadi di sekitarnya. Dalam rangka penerimaan/penolakan sebuah fenomena moral perlu disadari timbulnya pandangan fundamental pada apa yang dikatakan oleh berbagai pihak. Perhatikanlah sebuah cerita berikut mengenai seorang petani yang hendak menjual kudanya ke pasar.

Pagi-pagi buta pak tani berpamitan pada isterinya karena ia bersama anaknya akan pergi kepasar. Kedua bapak beranak itu hendak menjual kudanya. Bergegas kemudian mereka pergi bersama-sama sang kuda. Di tengah jalan seseorang berkomentar, koq punya kuda malah jalan kaki? Ketika petani sedang menimang-nimang hendak menaiki kuda, seorang lain berkomentar. Anak dan bapak koq jalan kaki, kasihan anakmu kalau berjalan terlalu jauh. Tanpa pikir panjang pak tani mengangkat anaknya ke atas pelana kuda dan melanjutkan perjalanan. Belum jauh berjalan, seorang lain berkomentar. Anak kurang ajar, bapaknya disuruh jalan kaki, dia enak-enak di atas kuda. Pak tani kemudian menurunkan anaknya, ganti sang ayah di atas pelana.

Selang beberapa lama kemudian, seseorang lain melintas sambil mencibir. Dasar, bapak tidak tahu diri. Dia enak-enak di atas pelana, anaknya tersiksa berjalan kaki. Karena takut akan dipermalukan, pak tani menaikkan lagi anaknya ke atas pelana.

Baru beberapa langkah berjalan, serempak beberapa orang tertawa sambil mencibir. Dasar, anak dan bapak tak tahu diri. Kasihan, kuda kurus kering dinaiki melebihi berat beban yang harus ditopangnya, sangat tak tahu diri. Merah padam muka pak tani. Segera dia menggendong kudanya dan bersama-sama anaknya tertatih-tatih dengan perut lapar dibawah terik sinar matahari yang kian tinggi melanjutkan perjalanan.

Ketika akhirnya pak tani, anaknya dan kuda sampai di pasar menjelang petang, tidak satupun orang yang ditemui karena pasar telah usai. Dengan terpaksa dan langkah lemah lunglai akhirnya pak tani pulang kembali ke rumah.

Begitulah, kalau seseorang terlalu menggantungkan keyakinannya pada pendapat orang lain, besar kemungkinan ia akan mengalami hal serupa persis sebagaimana dialami oleh petani di atas. Seharusnya apapun keputusan yang akan diambil hendaknya selalu didasarkan pada kemandirian dan penilaian mandiri.

- c. Metaetika, (*meta* - dalam Bahasa Latin; berarti mempunyai, lebih, melampaui). Istilah metaetika menunjukkan penggambaran tentang ucapan-ucapan moral. Metaetika bergerak dalam tatanan yang lebih tinggi dari hanya sekedar “etis” tetapi lebih pada tataran filsafat analitis (meski terkadang ada juga yang menyebutnya etika analitis) terhadap sejumlah fenomena moral. Pelopor aliran metaetika ini adalah George Moore awal abad ke-20 di Inggris. Metaetika menganalisis pengertian dan pemahaman misalnya tentang konsep “keadilan”. Apakah keadilan itu? Apakah “keadilan” itu akan bermakna sama bila dikaitkan dengan makna yang sama dengan “keadilan” dalam konteks yang lain? Metaetika mempunyai hubungan relatif sangat erat dengan etika normatif. Sebab berbicara ucapan-ucapan moral, dia terkait dengan perilaku moral itu sendiri. Sambil mempelajari ucapan moral, tanpa kita sadari ucapan moral itu langsung kita nilai tentang apakah yang sedang dibicarakan itu, aktifitas nyatanya apa, dan sebagainya. Sebaliknya bila kita berbicara perilaku moral, seketika itu juga kita akan terbawa pada pemikiran tentang istilah-istilah bahasa moral yang dipergunakan di dalamnya.

Etika deskriptif maupun etika normatif sangat membutuhkan metaetika, oleh karena dalam membuat berbagai argumentasi yang rasional dan kritis, diperlukan analisis-analisis mendalam tentang konsep, istilah, kata, dan seterusnya, yang semuanya mempengaruhi pemahaman manusia tentang suatu masalah. Pemahaman kritis demikian merupakan suatu model telaah yang terdapat dalam metaetika.

Tema Pokok dan Teori-teori Etika

Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai, dan norma perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik. Sepanjang studi yang pernah dilakukan, dalam etika dijumpai banyak teori yang mencoba menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang atau perspektif yang berlainan. Berikut ini beberapa teori etika.

Teori Relativisme

Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif, jawaban dari etika itu tergantung dari situasinya. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa tidak ada kriteria universal untuk menentukan perbuatan etis. Setiap individu mempunyai kriteria sendiri-sendiri dan berbeda setiap budaya dan negara. Hal ini pulalah yang menyebabkan mengapa konteks suatu perbuatan pada suatu tempat di suatu

negara akan memiliki makna yang berbeda di tempat lain pada negara lain bahkan di negara yang sama.

Teori Egoisme

Rachels (2004) memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme. Pertama, egoisme psikologis, adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkepentingan diri (*self servis*). Menurut teori ini, orang boleh saja yakin ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban, namun semua tindakan yang terkesan luhur dan/atau tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah sebuah ilusi. Pada kenyataannya, setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri. Menurut teori ini, tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruisme, yaitu suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya. Kedua, egoisme etis, adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri (*self-interest*). Tindakan berkepentingan diri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, sedangkan tindakan mementingkan diri sendiri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain.

Bila dicermati maka ada sejumlah elemen yang dapat dijadikan sebagai pokok-pokok pandangan pemikiran aliran egoisme etis:

- a. Egoisme etis tidak mengatakan bahwa orang harus membela kepentingannya sendiri maupun kepentingan orang lain.
- b. Egoisme etis hanya berkeyakinan bahwa satu-satunya tugas adalah kepentingan diri.
- c. Meski egois etis berkeyakinan bahwa satu-satunya tugas adalah membela kepentingan diri, tetapi egoisme etis juga tidak mengatakan bahwa anda harus menghindari tindakan menolong orang lain

Menurut paham egoisme etis, tindakan menolong orang lain dianggap sebagai tindakan untuk menolong diri sendiri karena mungkin saja kepentingan orang lain tersebut bertautan dengan kepentingan diri sehingga dalam menolong orang lain sebenarnya juga dalam rangka memenuhi kepentingan diri.

Dengan demikian bila disimpulkan paham egoisme etis adalah apabila ada tindakan yang menguntungkan orang lain, maka keuntungan bagi orang lain ini bukanlah alasan yang membuat tindakan itu benar. Yang membuat tindakan itu benar adalah kenyataan bahwa tindakan itu menguntungkan diri sendiri.

Alasan yang mendukung teori egoisme:

- a. Argumen bahwa altruisme adalah tindakan menghancurkan diri sendiri. Tindakan peduli terhadap orang lain merupakan gangguan ofensif bagi kepentingan sendiri. Cinta kasih kepada orang lain juga akan merendahkan martabat dan kehormatan orang tersebut.
- b. Pandangan terhadap kepentingan diri adalah pandangan yang paling sesuai dengan moralitas akal sehat. Pada akhirnya semua tindakan dapat dijelaskan dari prinsip fundamental kepentingan diri.

Meskipun ada dukungan pembenaran ke arah teori ini, namun terdapat sejumlah alasan yang menentang teori egoisme etis, antara lain dengan alasan:

- a. Egoisme etis tidak mampu memecahkan konflik-konflik kepentingan. Kita memerlukan aturan moral karena dalam kenyataannya sering kali dijumpai kepentingan-kepentingan yang bertabrakan.
- b. Egoisme etis bersifat sewenang-wenang. Egoisme etis dapat dijadikan sebagai pembenaran atas timbulnya rasisme.

Teori Utilitarianisme

Menurut teori ini, suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*). Paham utilitarianisme mengembangkan argumennya dalam bentuk konsep sebagai berikut:

- a. Ukuran baik tidaknya suatu tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu, apakah memberi manfaat atau tidak,
- b. dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan,
- c. kesejahteraan setiap orang sama pentingnya.

Perbedaan paham utilitarianisme dengan paham egoisme etis terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. Egoisme etis melihat dari sudut pandang kepentingan individu, sedangkan paham utilitarianisme melihat dari sudut pandang kepentingan orang banyak (kepentingan orang banyak).

Kritik terhadap teori utilitarianisme:

- a. Utilitarianisme hanya menekankan tujuan/manfaat pada pencapaian kebahagiaan duniawi dan mengabaikan aspek rohani.
- b. Utilitarianisme mengorbankan prinsip keadilan dan hak individu/minoritas demi keuntungan mayoritas orang banyak.

Teori Deontologi

Paradigma teori deontologi sangat berbeda dengan paham egoisme dan utilitarianisme, yang keduanya sama-sama menilai baik buruknya suatu tindakan memberikan manfaat entah untuk individu (egoisme) atau untuk banyak orang/kelompok masyarakat (utilitarianisme), maka tindakan itu dikatakan etis. Sebaliknya, jika akibat suatu tindakan merugikan individu atau sebagian besar kelompok masyarakat, maka tindakan tersebut dikatakan tidak etis. Teori yang menilai suatu tindakan berdasarkan hasil, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan tersebut disebut teori teleologi.

Sangat berbeda dengan paham teleologi yang menilai etis atau tidaknya suatu tindakan berdasarkan hasil, tujuan, atau konsekuensi dari tindakan tersebut, paham deontologi justru mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan.

Immanuel Kant berpendapat bahwa kewajiban moral harus dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri, bukan karena keinginan untuk memperoleh tujuan kebahagiaan, bukan juga karena kewajiban moral itu diperintahkan oleh Tuhan. Moralitas hendaknya bersifat otonom dan harus berpusat pada pengertian manusia berdasarkan akal sehat yang dimiliki manusia itu sendiri, yang berarti kewajiban moral mutlak itu bersifat rasional.

Walaupun teori deontologi tidak lagi mengkaitkan kriteria kebaikan moral dengan tujuan tindakan sebagaimana teori egoisme dan utilitarianisme, namun teori ini juga mendapat kritikan tajam terutama dari kaum agamawan. Kant mencoba membangun teorinya hanya berlandaskan pemikiran rasional dengan berangkat dari asumsi bahwa karena manusia bermartabat, maka setiap perlakuan manusia terhadap manusia lainnya harus dilandasi oleh kewajiban moral universal. Tidak ada tujuan lain selain mematuhi kewajiban moral demi kewajiban itu sendiri.

Teori Hak

Suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan HAM. Menurut Bentens (2000), teori hak merupakan suatu aspek dari (teori kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama.

Hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber otoritas, yaitu:

- a. Hak hukum (*legal right*), adalah hak yang didasarkan atas sistem/yurisdiksi hukum suatu negara, di mana sumber hukum tertinggi suatu negara adalah Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan.
- b. Hak moral atau kemanusiaan (*moral, human right*), dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu, atau dalam beberapa kasus dihubungkan dengan kelompok bukan dengan masyarakat dalam arti luas. Hak moral berkaitan dengan kepentingan individu sepanjang kepentingan individu itu tidak melanggar hak-hak orang lain
- c. Hak kontraktual (*contractual right*), mengikat individu-individu yang membuat kesepakatan/kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing kontrak.

Teori hak atau yang lebih dikenal dengan prinsip-prinsip HAM mulai banyak mendapat dukungan masyarakat dunia termasuk dari PBB. Piagam PBB sendiri merupakan salah satu sumber hukum penting untuk penegakan HAM. Dalam Piagam PBB disebutkan ketentuan umum tentang hak dan kemerdekaan setiap orang. PBB telah mendeklarasikan prinsip-prinsip HAM universal pada tahun 1948, yang lebih dikenal dengan nama *Universal Declaration of Human Rights*. (UdoHR). Diharapkan semua negara di dunia dapat menggunakan UdoHR sebagai dasar bagi penegakan HAM dan pembuatan berbagai undang-undang/peraturan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Pada intinya dalam UdoHR diatur hak-hak kemanusiaan, antara lain mengenai kehidupan, kebebasan

dan keamanan, kebebasan dari penahanan, peangkapan dan pengasingan sewenang-wenang, hak memperoleh memperoleh peradilan umum yang bebas, independen dan tidak memihak, kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, menganut agama, menentukan sesuatu yang baik atau buruk menurut nuraninya, serta kebebasan untuk berkelompok secara damai.

Teori Keutamaan (*Virtue Theory*)

Teori keutamaan berangkat dari manusianya (Bertens, 2000). Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Karakter/sifat utama dapat didefinisikan sebagai disposisi sifat/watak yang telah melekat/dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu bertingkah laku yang secara moral dinilai baik. Mereka yang selalu melakukan tingkah laku buruk secara amoral disebut manusia hina. Bertens (2002) memberikan contoh sifat keutamaan, antara lain: kebijaksanaan, keadilan, dan kerendahan hati. Sedangkan untuk pelaku bisnis, sifat utama yang perlu dimiliki antara lain: kejujuran, kewajaran (*fairness*), kepercayaan dan keuletan.

Teori Personal Libertarianism

Teori ini dikembangkan oleh Robert Nozick, dimana perbuatan etikal diukur bukan dengan keadilan distribusi kekayaan, namun dengan keadilan atau kesamaan kesempatan bagi semua terhadap pilihan-pilihan yang ada (diketahui) untuk kemakmuran mereka. Teori ini percaya bahwa moralitas akan tumbuh subur dari maksimalisasi kebebasan individu. Dalam konteks demikian ini maka kebebasan individual bersifat sangat azasi dan cenderung liberal.

Teori Ethical Egoism

Teori ethical egoism ini, memaksimalkan kepentingan individu dilakukan sesuai dengan keinginan individu yang bersangkutan. Kepentingan ini bukan harus berupa barang atau kekayaan, namun bisa juga berupa ketenaran, keluarga bahagia, pekerjaan yang baik, atau apapun yang dianggap penting oleh pengambil keputusan.

Teori Existentialism

Tokoh yang mengembangkan teori ini adalah Jean-Paul Sartre. Menurutny, standar perilaku tidak dapat dirasionalisasikan. Tidak ada perbuatan yang benar-benar salah atau benar-benar benar atau sebaliknya. Setiap orang dapat memilih prinsip etika yang disukai karena manusia adalah apa yang ia inginkan dirinya menjadi. Pilihan adalah hal yang mutlak menjadi dasar bagi seorang individu untuk melakukan atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu yang dikehendakinya sesuai dengan keberadaan dirinya.

Teori Etika Teonom

Sebagaimana dianut oleh semua penganut agama di dunia bahwa ada tujuan akhir yang ingin dicapai umat manusia selain tujuan yang bersifat duniawi, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan surgawi. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat Kristen, yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan/perintah Allah sebagaimana dituangkan dalam kitab suci.

Teori Konsekuensialisme

Teori ini menjawab “apa yang harus kita lakukan”, dengan memandang konsekuensi dari berbagai jawaban. Ini berarti bahwa yang harus dianggap etis adalah konsekuensi yang membawa paling banyak hal yang menguntungkan, melebihi segala hal merugikan, atau yang mengakibatkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Manfaat paling besar dari teori ini adalah bahwa teori ini sangat memperhatikan dampak aktual sebuah keputusan tertentu dan memperhatikan bagaimana orang terpengaruh. Kelemahan dari teori ini bahwa lingkungan tidak menyediakan standar untuk mengukur hasilnya.

Teori Intuisiisme

Teori ini berusaha memecahkan dilema-dilema etis dengan berpijak pada intuisi, yaitu kemungkinan yang dimiliki seseorang untuk mengetahui secara langsung apakah sesuatu baik atau buruk. Dengan demikian seorang intuisiis mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk berdasarkan perasaan moralnya, bukan berdasarkan situasi, kewajiban atau hak. Dengan intuisi kita dapat meramalkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tetapi kita tidak dapat mempertanggungjawabkan keputusan tersebut karena kita tidak dapat menjelaskan proses pengambilan keputusan.

Kegiatan Belajar 2. Urgensi Etika dan Nilai Kemanusiaan

Fungsi Etika

Sejak awal telah muncul banyak pertanyaan mendasar mengenai etika. Di antara pertanyaan yang umumnya terungkap ke permukaan adalah untuk apa manusia mengembangkan etika? Adakah kemanfaatan praktis yang mungkin diberikan oleh etika kepada manusia? Apakah yang dapat diharapkan terhadap etika? Terhadap pertanyaan di atas, secara sederhana dapat diberikan jawabannya, yaitu etika memberikan kepada kita apa yang diberikan oleh setiap ilmu pengetahuan. Etika dapat memberikan pemenuhan terhadap keingintahuan manusia. Selain itu,

apabila dicermati, maka tampak bahwa etika berusaha memberi petunjuk untuk beberapa jenis pertanyaan yang senantiasa timbul, antara lain:

- a. Apakah yang harus aku/kita lakukan dalam situasi konkret yang tengah dihadapi?
- b. Bagaimana kita akan mengatur pola konsistensi kita dengan orang lain?
- c. Akan menjadi manusia macam apakah kita ini?
- d. Apakah pengetahuan tentang etika itu mungkin?
- e. Apakah sumber-sumber dari pengetahuan semacam itu ?
- f. Apakah strategi-strategi teoritis untuk memecahkan konflik antar berbagai sumber tersebut?

Dalam konteks di atas etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis. Etika berusaha mencegah tersebarnya *fratricida* yang secara legendaris dan historis mewarnai sejarah hidup manusia.

Rohaniawan Franz Magnis-Suseno (1991) menyatakan bahwa etika berfungsi untuk membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Etika adalah pemikiran sistematis, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Pengertian ini perlu dicari dengan landasan pemikiran sebagai berikut:

- a. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral. Dalam keseharian kita banyak bertemu dan bergaul dengan berbagai orang dan karakter yang serba berbeda dari suku yang beragam, daerah asal yang bervariasi, agama berbeda dan sebagainya. Kita ada di tengah-tengah pandangan mengenai etika dan moral yang beraneka ragam bahkan tidak jarang saling bertentangan, sehingga kita bingung mengikuti moralitas yang mana. Untuk menentukan pilihan itulah perlu refleksi kritis etika.
- b. Kita hidup dalam masa transformasi masyarakat yang kian lama menuju modernisasi. Meski masih belum dijumpai batasan baku tentang makna modernisasi, konsep ini membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menentang pandangan-pandangan moral tradisional;
- c. Proses perubahan sosial budaya dan moral ternyata tidak jarang digunakan berbagai pihak untuk memancing di air keruh. Adanya pelbagai ideologi yang ditawarkan sebagai penuntun hidup, masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup. Etika dapat dijadikan tatanan untuk mengkritisi secara obyektif dan memberi penilaian agar tidak mudah terpancing, tidak naif atau ekstrem untuk cepat-cepat menolak hanya karena masih relatif baru dan belum biasa;
- d. Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka, di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.

Bagi dunia pendidikan, etika juga memiliki fungsi yang penting. Suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional, tidaklah lengkap. Di bidang hukum, sebagai suatu contoh, ketrampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap orang yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya. Tanpa adanya landasan etika dan moral dalam mengembangkan profesi tidak terbayangkan apa yang akan terjadi bila menimpa para insan-insan mahasiswa sebagai penerus pembangunan bangsa ini.

Di Indonesia, dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. Pada dasarnya sivitas akademika memiliki kebebasan untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri. Namun pada kenyataannya, aktivitas otonomi keilmuan dan kebebasan akademik ini tidak dapat sepenuhnya berlangsung sebagaimana yang dikehendaki. Ia masih terbelenggu oleh sejumlah pembatasan dalam bentuk peraturan dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Perguruan tinggi tidak dilaksanakan dalam sebuah "ruang hampa", tetapi selalu terkait dan tergantung pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Hal ini mengakibatkan tata nilai, norma, perundangan, peraturan yang menjadi rambu-rambu dan memandu perkembangan masyarakat, selalu harus diperhatikan dan dipegang serta harus menjadi acuan dalam pengelolaan perguruan tinggi. Dengan demikian asas otonomi yang diberlakukan dalam pengelolaan perguruan tinggi meliputi juga pengembangan keilmuan dus juga sumber daya manusianya harus disertai dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Unsur pertanggungjawaban dapat dilekatkan pada sejumlah tatanan etika moralitas maupun tatanan yuridis formal. Pemetaan tata nilai melalui mekanisme Senat sebagai lembaga tertinggi perlu disusun sedemikian rupa tanpa tujuan memasung kreativitas dan otonomi keilmuan namun seharusnya lebih pada penyatuan persepsi pemahaman visi, misi dan aktivitas kelembagaan semata-mata.

Dalam tata pergaulan antara manusia satu dengan lainnya hampir dapat dipastikan bahwa kehendak bebas yang sebebaskan-bebasnya tidak pernah dapat terwujud. Terdapat sejumlah benturan yang harus diwujudkan menjadi setara dan berimbang antar manusia dalam tata pergaulan itu. Oleh karena benturan itulah maka estetika pergaulan yang serasi dan selaras harus diwujudkan dan harus dapat dikembalikan kepada jalinan nilai agar semua pihak dapat menerimanya secara moral. Pengembalian kepada hakekat moral itu dilandasi pada filosofi bahwa nilai moral adalah perwujudan hak-hak dasar manusia sehingga sudah sepatutnya dikedepankan.

Etika dan etiket

Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan kata etika dan etiket sering dipadankan dalam pemakaian yang sama. Secara epistemologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (bentuk tunggal). *Ethos* berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Bentuk jamaknya *tha etha* yang berarti adat istiadat. Diperkirakan terminologi istilah inilah yang kemudian berkembang menjadi etika.

Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan sebagai suatu tatanan kepatutan, adat istiadat, yang berkenaan dengan hidup yang baik dan buruk. Ia melekat pada manusia pribadi dengan tuntutan atas dasar kehendak bebas dalam kaitannya membentuk manusia yang berpribadi. Manusia demikian akan memiliki tanggung jawab dan kewajiban serta sanksi moral. Pada akhirnya sekumpulan kebiasaan moral itu menjadi sesuatu yang bernilai bagi kehidupan individu dan orang-orang disekitarnya dalam struktur masyarakat (kolektive manusia) secara permanen.

Kata etiket berasal dari *etiquette*, yang berarti aturan-aturan kesopansantunan atau tata krama. Aturan demikian berlaku terhadap manusia dalam rangka pergaulan dan hidup bermasyarakat. Bila dicermati, istilah etiket dan etika memiliki persamaan, antara lain: sama-sama menyangkut tentang manusia dan aspek perilakunya, sama-sama mengatur manusia dari sudut normatif, yaitu bahwa apa yang diatur, hanya memberi tatanan norma saja. Pelaksanaannya diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk melaksanakan atau tidak.

Selain terdapat persamaan, antara etika dan etiket terdapat perbedaan. Beberapa perbedaannya antara lain:

- a. Selain terbatas hanya pada cara melakukan suatu perbuatan, etika juga memberi norma tentang perbuatan. Etika memberikan batasan pengertian secara mendasar apakah sesuatu itu boleh atau tidak dilakukan. Karena mempergunakan logika umum, maka ketentuan etika bersifat universal. Etika dapat dilakukan dimanapun dan dalam situasi apapun juga. Misalnya, masuk rumah orang lain tanpa izin adalah perbuatan yang tidak baik. Dimanapun ketentuan seperti ini bersifat rasional. Cara masuk bukanlah persoalan, apakah melompat, mempergunakan tangga, dll. Etiket menyangkut suatu cara perbuatan harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh manusia secara baik dan benar sesuai dengan yang diharapkannya. Dari berbagai kemungkinan perbuatan yang mungkin dapat dilakukan oleh manusia, maka salah satu di antaranya harus memenuhi standar moral untuk dilakukan. Kalau etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri, maka etiket menunjukkan mana di antara perbuatan tersebut memenuhi syarat moral meski pada prinsipnya tetap dapat dilakukan. Contoh: manusia makan mempergunakan tangan. Meskipun kedua tangan dapat digunakan namun akan menunjukkan etiket apabila seseorang makan mempergunakan tangan kanan bukan dengan tangan kiri. Etika menuntun manusia agar secara bersungguh-sungguh menjadi orang yang baik, agar memiliki sikap etis. Seseorang yang memiliki sikap etis tidak akan munafik karena selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran “apa adanya”. Etiket justru sebaliknya mengedepankan apa “yang seharusnya”.

- b. Etika berlaku tidak bergantung pada ada atau tidaknya orang lain, misalnya larangan mencuri selalu berlaku, baik ada atau tidak orang lain. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, jika tidak ada orang lain hadir etiket dapat tidak berlaku. Contoh jika makan sendiri tanpa orang lain, sambil telanjang pun tidak jadi masalah. Ketika makan, dianggap melanggar etiket kalau mulut mengeluarkan bunyi atau meletakkan kaki di atas meja. Kalau sendirian, pelanggaran demikian tidak pernah dipersoalkan.
- c. Etika bersifat absolut, tidak dapat ditawar-tawar, misalnya jangan mencuri, jangan membunuh. Ketentuan ini bersifat pasti baik ada ataupun tidak pemilik barang. Mencuri adalah perbuatan tercela dan terlarang. Sebaliknya, etiket keberlakuannya lokal dan bersifat relatif. Etiket terbatas pada tempat dan kebudayaan suatu suku bangsa/lokasi tertentu sehingga tidak bersifat universal. Tidak sopan dalam suatu kebudayaan dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contoh memegang kepala orang lain, di Indonesia tidak sopan tetapi di Amerika biasa saja.
- d. Etika memandang manusia dari segi dalam (bathiniah). Orang yang bersikap etis adalah orang yang benar-benar baik, sifatnya tidak munafik. Etiket memandang manusia dari segi luar (lahiriah), tampaknya dari luar sangat sopan dan halus, tetapi di dalam dirinya penuh kebusukan dan kemunafikan. Pepatah lama menyatakan orang yang penuh kepura-puraan sebagai musang berbulu domba/ayam. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik. Penipu berhasil melaksanakan niat jahatnya karena penampilannya begitu santun dan menawan hati, sehingga mudah meyakinkan dan mengecoh korbannya.

Dengan mencermati uraian perbedaan dan beberapa contoh yang dikemukakan di atas, seyogyanya tidak ada lagi penyebutan secara campur aduk antara etika dan etiket. Terdapat benang merah yang jelas terhadap perbedaan makna ke dua istilah tersebut. Etika sebagai konsep perilaku berdasar kepada kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak bebas manusia. Sebagai suatu konsep, dalam perkembangannya etika dibedakan atas etika perangai dan etika moral (Sumaryono; 1955).

- a. Etika perangai wujudnya berupa adat istiadat, kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di suatu daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Eksistensi dari perangai dalam kelompok masyarakat diakui dan dinyatakan berlaku karena disepakati masyarakatnya berdasarkan hasil penilaian perilaku.
- b. Etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Pelanggaran terhadap etika moral ini menimbulkan kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan yang tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral.

Menurut E.Y Kanter (2001), perspektif etika dalam perwujudan perilaku moralitas adalah tugas etika moral. Hal ini dikarenakan etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis-rasional tentang moral. Melalui etika maka akan dapat dipahami orientasi kritis manakala berhadapan dengan pelbagai moralitas yang membingungkan. Manusia

memerlukan optimalisasi pola demikian ini, untuk dijadikan pemahaman dasar pengambilan sikap yang wajar dan bertanggungjawab dalam suasana pluralitas moral yang merupakan ciri khas jaman ini agar tidak bingung atau muncul dalam perilaku yang semata-mata hanya ikut-ikutan.

Setiap masyarakat mengenal dan memiliki nilai-nilai dan norma-norma etis. Pada tahap tertentu kesatuan nilai-nilai dan norma tersebut pada berbagai lingkup masyarakat pastilah berbeda, meski tak dapat dihindari ada pula yang bersifat universal. Namun kini, pluralismemoral itu tidak dapat dihindari. Bahkan pluralisme moral kini menjadi sebuah isu sentral dalam dunia modern. Kecenderungan untuk meniru dan berubah sejalan dengan perkembangan teknologi, misalnya tidak jarang menimbulkan *cultural shock* suatu keadaan yang barangkali dulu tidak terprediksikan. Fenomena telenovela ataupun sinetron yang menghadirkan nuansa glamour yang gencar ditayangkan berbagai stasiun televisi akhir-akhir ini adalah salah satu gejala konkret yang secara seketika dapat kita cermati dalam keseharian remaja putri dan ibu-ibu rumah tangga di kalangan menengah ke bawah.

Adanya kepedulian etis yang tampak di seluruh dunia bahkan melewati batas negara, di antaranya tampak nyata pada dimensi globalisasi ekonomi. Berbagai konsep dasar tentang moral demikian saja bergulir dan dijadikan kesepahaman di antara berbagai suku bangsa di dunia. *Declaration universal of human rights* apabila dicermati bukanlah satu-satunya dan pertama kali dalam bentuk konsep moral dimunculkan. Namun fakta yang terjadi kemudian adalah deklarasi yang dikumandangkan PBB ini secara serentak diakui oleh semua orang di berbagai muka bumi sebagai tonggak pernyataan moral yang sangat spektakuler akhir abad 20. Hingga saat ini sejumlah persoalan hak asasi, bertitiktolak dari ancaman konsep deklarasi ini.

Fakta pengakuan moralitas secara global lain misalnya adalah ketika KTT Bumi di Rio de Janeiro merekomendasikan pengelolaan aspek lingkungan sosial budaya dan global sebagai akibat perkembangan teknologi harus menjadi dasar utama pembangunan dan diwujudkan oleh negara sedang berkembang. Inilah dasar munculnya konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang seusai sidang KTT seketika direspons dan diterima bulat oleh hampir semua hadirin dari berbagai suku bangsa dan negara berdaulat.

Ketika Plato dan Sokrates memegang teguh norma-norma yang berlaku dalam *polis* (negara kota) Yunani masa abad ke-5 sM di tengah-tengah kebobrokan moralitas, mereka mendapat cibiran dan cercaan. Kedua filsuf ini tetap kokoh memegang teguh norma-norma yang dilandasi filsafat moral. Baru beberapa generasi kemudian dasar filosofi dan moralitas ini diakui kebenarannya oleh karena dia tumbuh dari filosofi luhur ummat manusia. Semua filsafat moral yang dipertahankannya ternyata hingga kini tetap relevan dipertahankan sebagai suatu kebenaran.

Dengan bertitik tolak pada sejumlah fenomena di atas, maka wajar jika etika menjadi acuan pesan moral membangkitkan konsep etis yang harus tetap dipegang

bagaimanapun wujud perubahan konsep moralitas dalam modernisasi yang menimpa manusia.

Ada beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan etika. Masing-masing konsep tersebut memiliki arti berbeda, yaitu:

- a. Etika adalah norma manusia harus berjalan, bersikap sesuai nilai/norma yang ada.
- b. Moral merupakan aturan dan nilai kemanusiaan (*human conduct & value*), seperti sikap, perilaku dan nilai.
- c. Etika adalah tata karma/sopan santun yang dianut oleh suatu masyarakat dalam kehidupannya.
- d. Nilai adalah penetapan harga sesuatu sehingga sesuatu itu memiliki nilai yang terukur.
- e. Moralitas adalah aturan yang berhubungan dengan apakah sumber hukum selalu sesuai dengan moral?
- f. Hukum adalah ketentuan tentang apakah kegiatan yang tidak dilarang oleh hukum selalu sesuai dengan moral?

Pengertian dan Jenis-jenis Nilai

Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan.

Apabila dilakukan rekonstruksi secara komprehensif, maka jenis-jenis nilai dapat dijabarkan sebagaimana di bawah ini:

1. Nilai Budaya: berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia yang merupakan suatu hal yang dianggap baik atau buruk bagi kehidupan. Meskipun sesuatu itu abstrak, namun hal tersebut menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat.
2. Nilai Moral: berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat, istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki *nilai* positif atau negatif.
3. Nilai Agama: berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT dan utusan-utusannya. Salah satu dari macam-macam nilai yang mendasari perbuatan seseorang atas dasar pertimbangan kepercayaan bahwa sesuatu itu dipandang benar menurut ajaran agama.
4. Nilai Politik: berkaitan dengan cara manusia dalam meraih kemenangan. Suatu kegiatan bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.
5. Nilai Sosial: nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Tak heran apabila antara

masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai.

6. Nilai Keilmuan: salah satu dari macam-macam nilai yang mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang bekerja terutama atas dasar pertimbangan rasional. Nilai keilmuan ini dipertentangkan dengan nilai agama.
7. Nilai Ekonomi: nilai yang mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang atas dasar pertimbangan ada tidaknya keuntungan finansial sebagai akibat dari perbuatannya itu. Nilai ekonomi ini dikontraskan dengan nilai seni.
8. Nilai Seni: nilai yang mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang atas dasar pertimbangan rasa keindahan atau rasa seni yang terlepas dari berbagai pertimbangan material.
9. Nilai Solidaritas: nilai yang mendasari perbuatan seseorang terhadap orang lain tanpa menghiraukan akibat yang mungkin timbul terhadap dirinya sendiri, baik itu berupa keberuntungan maupun ketidakberuntungan. Nilai solidaritas ini dikontraskan dengan nilai kuasa.
10. Nilai Kuasa: nilai yang mendasari perbuatan seseorang atau sekelompok orang atas dasar pertimbangan baik buruknya untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya.
11. Nilai Material: segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia.
12. Nilai Vital: segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
13. Nilai Religius: nilai kerohanian tertinggi dan mutlak serta bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.
14. Nilai Kerohanian: segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.
15. Nilai Logika: nilai yang terkait dengan pemaknaan benar atau salah.
16. Nilai Estetika: nilai indah atau tidak indah.
17. Nilai Etika: nilai tentang baik atau buruk.
18. Nilai Kebenaran: sesuatu yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
19. Nilai Keindahan: sesuatu yang bersumber pada unsur perasaan manusia.
20. Nilai Watak: nilai yang meliputi semua tantangan, kesalahan pribadi dan sosial termasuk keadilan, kesediaan menolong, kesukaan pada kebenaran, dan kesediaan mengontrol diri.
21. Nilai Kejasmanian: nilai-nilai yang berhubungan dengan kondisi jasmani seseorang.
22. Nilai Perserikatan: nilai-nilai yang meliputi berbagai bentuk perserikatan manusia dan persahabatan kehidupan keluarga, sampai dengan tingkat internasional.
23. Nilai Rekreasi: nilai-nilai permainan pada waktu senggang, sehingga memberikan sumbangan untuk menyejahterakan kehidupan maupun memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
24. Nilai Dominan: nilai yang dianggap lebih penting dibanding nilai lainnya.
25. Nilai yang Mendarah Daging: nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan seseorang menjalankannya secara tak sadar.

26. Nilai Subjektif: nilai suatu objek yang bergantung pada subjek yang menilainya.
27. Nilai Objektif: nilai suatu objek yang melekat pada objeknya dan tidak bergantung pada subjek yang menilai (bersifat universal).
28. Nilai Kesusilaan: nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam berbagai aktivitas masyarakat.
29. Nilai Spiritual: nilai spiritual adalah nilai yang ada di dalam kejiwaan manusia.

Etika dan Munculnya Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya.

Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Pengertian tersebut merupakan kesimpulan dari beberapa pengertian nilai diatas, dimaksudkan sebagai takaran manusia sebagai pribadi yang utuh atau nilai yang berkaitan dengan konsep benar dan salah yang dianut oleh 9 golongan atau masyarakat tertentu.

Nilai kemanusiaan adalah nilai mengenai harkat dan martabat manusia. Manusia merupakan makhluk yang tertinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan sehingga nilai-nilai kemanusiaan tersebut mencerminkan kedudukan manusia sebagai makhluk tertinggi di antara makhluk-makhluk lainnya. Seseorang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi menghendaki masyarakat memiliki sikap dan perilaku sebagai layaknya manusia. Sebaliknya dia tidak menyukai sikap dan perilaku yang sifatnya merendahkan manusia lain.

Nilai budaya dalam hubungan manusia dengan masyarakat adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan kepentingan para anggota masyarakat, bukan nilai yang dianggap penting dalam satu anggota masyarakat sebagai individu, sebagai pribadi. Individu atau perseorangan berusaha mematuhi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat karena dia berusaha untuk mengelompokkan diri dengan anggota masyarakat yang ada, yang sangat mementingkan kepentingan bersama bukan kepentingan diri sendiri.

Kegiatan Belajar 3. Prinsip-prinsip Etika dan Nilai Kemanusiaan

Prinsip-prinsip Etika

Dalam peradaban sejarah manusia sejak abad keempat sebelum Masehi para pemikir telah mencoba menjabarkan berbagai corak landasan etika sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Para pemikir itu telah mengidentifikasi sedikitnya terdapat ratusan macam ide agung (great ideas). Seluruh gagasan atau ide agung tersebut dapat diringkas menjadi enam prinsip yang merupakan landasan penting etika, yaitu keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran sebagaimana diuraikan di bawa ini.

Prinsip Keindahan: Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Misalnya dalam berpakaian, penataan ruang, dan sebagainya sehingga membuatnya lebih bersemangat untuk bekerja.

Prinsip Persamaan: Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun.

Prinsip Kebaikan: Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat- menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan sebagainya. Manusia pada hakikatnya selalu ingin berbuat baik, karena dengan berbuat baik dia akan dapat diterima oleh lingkungannya. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi masyarakat.

Prinsip Keadilan: kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Oleh karena itu, prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain.

Prinsip Kebebasan: sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Dalam prinsip kehidupan dan hak asasi manusia, setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain. Untuk itu kebebasan individu disini diartikan sebagai: kemampuan untuk berbuat sesuatu atau menentukan pilihan, kemampuan yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihannya tersebut, dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Prinsip Kebenaran: Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis/rasional. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat. Tidak setiap kebenaran dapat diterima sebagai suatu kebenaran apabila belum dapat dibuktikan.

Semua prinsip yang diuraikan di atas merupakan prasyarat dasar dalam pengembangan nilai-nilai etika atau kode etik dalam hubungan antar individu, individu dengan masyarakat, dengan pemerintah, dan sebagainya. Etika yang disusun sebagai aturan hukum yang akan mengatur kehidupan manusia, masyarakat, organisasi, instansi pemerintah, dan pegawai harus benar-benar dapat

menjamin terciptanya keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran bagi setiap orang.

Nilai-nilai Kemanusiaan

Secara sederhana nilai-nilai kemanusiaan nampak dalam domain pengamatan perilaku manusia yang dijalankan dengan penuh kesadaran secara pemikiran, sikap, dan perilaku dalam menegakan penghormatan terhadap hak – hak asasi manusia dan kemuliaanya yang sesuai terhadap nilai – nilai akidah dan moral yang berlaku pada masyarakat. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu sifatnya universal.

Beberapa contoh dari nilai kemanusiaan antara lain: bersikap adil terhadap sesama, tidak bersikap semena – mena terhadap sesama, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku, mencintai, menghargai, serta menghormati terhadap sesama manusia, menjalankan kewajiban asasi manusia guna memberikan hak asasi manusia terhadap orang lain.

Selain itu, menunjukkan rasa tanggung jawab, menerima dan menghargai pendapat yang bersumber dari orang lain, taat dan mematuhi kaidah atau aturan yang telah disusun dan sebagainya.

Kegiatan belajar 4. Implementasi Etika dan Nilai Kemanusiaan

Etika, Pancasila dan Nilai Kemanusiaan

Telah dinyatakan di atas bahwa nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Adanya dua macam nilai tersebut sejalan dengan penegasan pancasila sebagai ideologi terbuka. Perumusan pancasila sebagai dalam pembukaan UUD 1945. Alinea 4 dinyatakan sebagai nilai dasar dan penjabarannya sebagai nilai instrumental. Nilai dasar tidak berubah dan tidak boleh diubah lagi. Betapapun pentingnya nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu, sifatnya belum operasional. Artinya kita belum dapat menjabarkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan UUD 1945 sendiri menunjuk adanya undang-undang sebagai pelaksanaan hukum dasar tertulis itu. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu memerlukan penjabaran lebih lanjut. Penjabaran itu sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Penjabaran itu kemudian dinamakan Nilai Instrumental.

Nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya.

Diterimanya pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Nilai Ketuhanan

Nilai ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.

Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

Nilai Persatuan

Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa indonesia.

Nilai Kerakyatan

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

Nilai Keadilan

Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atauun batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan

ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar diatas dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia.

Realisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini merupakan induk sila-sila kedua, tiga, empat, dan lima dimana sila Ketuhana Yang Maha Esa ini menjadi dasar bagi seluruh umat beragama di Indonesia dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bermasyarakat, beribadah, bersosialisasi dan dalam aspek kehidupan lainnya. Dalam sila ini bangs aindonesia mengaku adanya Tuhan Snag Pencipta dan mengakui bahwa seluruh alam semeste ini adalah ciptaan-Nya. Realisasi dari nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa antara lain terwujud dalam perilaku:

- a. Beriman dan bertaqwa yaitu secara sadar patuh melaksanakan perintah Tuhan.
- b. Setiap umat harus mempelajari agama dan mengamalkannya.
- c. Saling menghormati dan bekerja samadengan pemeluk agama lain tanpa adanya sekat atau batas agama.
- d. Saling menghormati dan bertoleransi dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- e. Tidak memaksa suatu agama kepada pemeluk agama lain.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Baradab

Butir kedua dari Pancasila yang mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara dimata Tuhan. Yang intinya seluruh manusia itu sama derajatnya baik si miskin maupun si kaya, yang berpangkat maupun tidak mereka tetap sama. Realisasi dari sila ini dalam tata kehidupan sosial antara lain perilaku:

- a. Mengakui persamaan hak, derajat, dan kewajiban antar sesama manusia.
- b. Saling mencintai sesama manusia.
- c. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
- d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Seperti gemar mengikuti kegiatan donor darah, menyantuni anak yatim, dan lain-lain.
- f. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- g. Mentaati hukum dan tidak diskriminatif.

Sila Persatuan Indonesia

Sila ketiga dari Pancasila yang mengandung makna bahwa Indonesia ini adalah negara persatuan dan menjunjung tinggi nlai kesatuan. Ini dibuktikan dengan kehidupan disleuruh penjuru Indonesia mulai dari sabang sampai merauke yang beraneka ragam suku, budaya, ras, dan agamanya tetapi metap mengakui bahwa

mereka adalah satu yaitu bangsa Indonesia, yang terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika “ walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Realisasi dari sila ini dalam tata perilaku kehidupan sosial adalah:

- a. Menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Rela berkorban demi bangsa dan Negara: bekerja keras, tidak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Cinta tanah air Indonesia.
- d. Meningkatkan prestasi di segala bidang.
- e. Bangga dan percaya diri sebagai bangsa Indonesia.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, pasti terjadi banyak perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam setiap aspek kehidupan, hal ini dikarenakan tidak ada manusia di dunia ini yang sama. Untuk itu sila ke empat Pancasila ini menjelaskan tentang budaya demokrasi, bahwa perbedaan itu hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan dan setiap warga negara Indonesia berhak dan diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya baik pribadi maupun dimuka umum. Bahkan kebanyakan orang mengatakan bahwa yang membuat indah itu adalah perbedaan, tanpa perbedaan itu dunia ini akan terasa monoton. Realisasi dari nilai sila ini di antaranya:

- a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi.
- b. Tidak memaksa kehendak kepada orang lain.
- c. Mengutamakan budaya musyawarah mufakat dalam setiap keputusan bersama.
- d. Menghormati setiap pendapat yang ada, dengan prinsip bahwa perbedaan pendapat itu wajar.
- e. Aktif dalam musyawarah, memberikan hak suara, dan mengawasi wakil rakyat.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Seluruh manusia di dunia ini memiliki keadilan yang sama tanpa membedakan status sosial atau ukuran apapun. Di Indonesia seluruh keadilan rakyat dijiwai oleh sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang berarti seluruh rakyat Indonesia memiliki keadilan dan derajat yang sama baik dimata pemerintah maupun di depan hukum. Realisasi dari nilai sila ini antara lain:

- a. Menjunjung tinggi keadilan.
- b. Bersikap adil terhadap sesama (tidak pilih kasih).
- c. Menolong sesama manusia yang membutuhkan (tidak egois dan tidak individualis).
- d. Menghargai karya orang lain (tidak membajak dan membeli produk bajakan)
- e. Bekerja keras (tidak pasrah dengan takdir Tuhan)

- f. Menghargai orang lain dengan tidak menghalangi orang lain untuk hidup lebih baik.
- g. Tidak merusak prasarana umum dan menjaga kebersihan di tempat umum.

Etika Global dan Nilai Kemanusiaan

Nilai (*value*) biasanya dipergunakan untuk menunjuk kata benda yang abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). Menilai dengan demikian berarti menimbang, yaitu suatu kegiatan untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan diakhiri dengan keputusan akhir. Keputusan ini berupa hasil akhir berupa pernyataan baik, buruk, atau benar, salah, indah dan sebagainya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa nilai sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap atau bertingkah laku baik disadari ataupun tidak. Untuk mempermudah mengenal nilai cara klasik yang selalu digunakan adalah dengan memperbandingkan sebuah perumusan dengan perumusan lain yang setara. Namun kenyataannya, perumusan tentang apakah nilai itu sesungguhnya amat sulit untuk dirumuskan secara tepat.

Meskipun terdapat kesulitan dalam merumuskan kekekuan konsep tentang nilai, namun di dalam praktek karakteristik sifat-sifat nilai dapat dirumuskan sbb:

- a. Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai itu. Misalnya, orang yang memiliki kejujuran. Kejujuran adalah nilai, tetapi kita tidak bisa mengindra kejujuran itu. Yang dapat kita indra adalah kejujuran itu.
- b. Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal (*das sollen*). Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misalnya, nilai keadilan. Semua orang berharap dan mendapatkan dan berperilaku yang mencerminkan nilai keadilan.
- c. Nilai berfungsi sebagai daya dorong/motivator dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Misalnya, nilai ketakwaan. Adanya nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat ketakwaan.

Konteks saat ini, sebenarnya menunjukkan bahwa kita sedang berada pada sebuah keprihatinan dunia yang semakin tidak menentu arahnya. Dunia yang semakin tidak bersahabat, tidak damai, dan seolah-olah tidak menghargai kemanusiaan, dunia yang diwarnai dengan pergolakan, konflik dan pertumpahan darah. Anehnya agama kemudian dijadikan alat, ditunggangi atau bahkan ikut melegitimasi kekacauan, konflik dan perang. Agama, dalam konteks ini digunakan sebagai alasan pembenaran bagi tindakan melawan kemanusiaan.

Kalau dicermati secara saksama, fenomena keagamaan yang kita alami banyak memberikan kesan paradoksal, tidak saja di Indonesia tapi juga pada skala makro. Setiap agama besar dunia, terutama aspek esoteriknya menawarkan jalan moral-spiritual yang sangat sejuk, indah, hidup damai dan intim dengan Dia Yang Maha

Abadi yang selalu didambakan oleh orang beriman. Namun, ketika agama menjelma menjadi sebuah institusi sosial (secara historis memang tidak bisa dihindari), maka masuklah berbagai muatan kepentingan dan media penyaluran keluh-kesah pemeluknya yang merasa kalah dan terancam dalam persaingan hidup. Agama yang awalnya diyakini sebagai wahyu Tuhan yang *transhistoris*, kemudian berkembang menjadi sebuah realitas sosial-historis sebagai sebuah ideologi. Namun perlu dicatat bahwa watak ideologi cenderung berfikir hitam-putih, komunalistik, emosional dan selalu mengasumsikan adanya musuh bersama yang datang dari luar. Tanpa musuh bersama, ideologi akan melemah.

Dalam konteks demikian ini pengenalan dan peletakan pondasi moral, agama dan etika di era global menduduki posisi yang sangat strategis. Posisi strategis ini tidak hanya semata sebagai bahan kajian namun sekaligus pemahaman dan implementasinya. Etika global sudah seharusnya menjadi pintu masuk akan adanya penyadaran nilai-nilai sosial keagamaan sekaligus menjadi pegangan dalam setiap aktivitas kehidupan ummat manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat suatu Negara dan masyarakat dunia dalam skala yang lebih makro.

Dalam konteks seperti ini, etika global harus terus di dialogkan, sebab nilai kemanusiaan, sifat pemaaf, toleran dan kasih sayang dengan sesama manusia yang ditawarkan, sebenarnya mampu mendorong sebuah dinamika perubahan sosial, termasuk perubahan paradigma agama-agama. Etika global hadir dalam rangka memperjuangkan martabat manusia, yang selama ini martabat manusia itu dikorbankan untuk institusi agama. Permasalahannya, gerakan ideologi cenderung memunculkan sikap militan yang ada kalanya destruktif dan menggeser akal sehat ketika menghadapi kelompok yang berbeda, bahkan gerakan keagamaan dalam realitasnya sering menafikan nilai-nilai etika global. Karena itu, dialog antar dan antara agama harus tetap ada dalam proses yang menjadi.

Berkaitan dengan pengertian nilai dan filosofi yang terkandung di dalamnya sebagaimana uraian di atas, maka tampak bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang telah ditetapkan oleh *the founding fathers* ketika memproklamasikan kemerdekaan negara RI tanggal 17 Agustus 1945 apabila dicermati sangat sarat dengan nilai, seperti harmonisasi humanistik, estetis, etis, religius dalam rumusan sila-silanya. Oleh karenanya apabila dilaksanakan secara murni dan konsekwen, nilai-nilai dalam Pancasila yang abstrak (*das Sollen*) akan menjadi kenyataan (*das Sein*). Pancasila mengandung sejumlah nilai yang bermakna asasi seperti:

- a. Nilai yang bersifat kerokhanian; Nilai kerokhanian (bahkan sekaligus harmonisasi, estetis, etis, sekaligus religius) tercermin dalam rumusan sila pertama hingga sila kelima. Antara sila satu dengan sila lainnya terdapat kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- b. Nilai yang bersifat objektif; Sila-sila dalam Pancasila menunjukkan makna yang objektif, umum serta universal.
- c. Nilai yang bersifat subjektif; Keberadaan dan pelaksanaan sila-sila dalam Pancasila sepenuhnya tergantung pada bangsa Indonesia sendiri.

Pancasila yang telah dirumuskan oleh pendiri Republik ini kemudian dijabarkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang rumusan selengkapnya sbb: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

E. Ringkasan

Kajian tentang etika telah melewati jalan perdebatan yang sangat panjang. Etika menuntun manusia ke arah perilaku baik-buruk, benar-salah. Impelementasi etika akan mewujudkan keserasian dan keselarasan dalam tata laku kehidupan social dalam kerangka kehidupan manusia secara bersama-sama.

Etika memunculkan konsep tentang nilai yang bersifat universal. Ragam konsep tentang nilai memberi pemahaman bahwa pada dasarnya nilai itu memiliki kompleksitas peranan dalam aktivitas hidup manusia tergantung dengan formulasi dari mana sudut pandang penilaian itu dilakukan. Nilai itu tidak hanya terdapat pada sesuatu yang berwujud (dalam aspek material semata) namun sesuatu yang tidak berwujud pun mungkin memiliki nilai bahkan tidak jarang nilainya lebih tinggi dari benda yang berwujud (contohnya nilai religius). Dengan perspektif demikian maka dapat dipahami, bahwa aspek nilai dan penilaian baru akan dapat dilakukan secara maksimal apabila telah diwujudkan dalam suatu simbol-simbul tertentu. Hal ini akan menuntun sikap dan tingkah laku manusia untuk memahami secara interpersonal.

Sistem nilai yang dimiliki dan dianut masyarakat menjadi tolok ukur kebenaran dan kebaikan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan masyarakat bersangkutan. Sistem ini memiliki fungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan antara pribadi, pribadi dengan sesama, pribadi dengan aras di sekitarnya. Di era global kesepahaman tentang nilai keuniversalan itu harus mulai dibangun dan diberi ruang agar terjadi kehidupan yang harmonis di antara semua anggota masyarakat dan bangsa.

F. Latihan

Berhimpunlah dalam sebuah kelompok kecil maksimal 5 orang. Lakukanlah diskusi dengan tema identifikasi nilai-nilai Pancasila dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika. Adakah nilai yang bersifat universal yang anda temukan dari keseluruhan identifikasi yang saudara hasilkan dalam diskusi dalam kelompok saudara?

G. Umpan Balik

Bandingkan hasil diskusi kelompok saudara dengan kelompok lain. Lalu lakukanlah diskusi dengan kelompok lain tersebut sehingga menghasilkan simpulan secara global dari seluruh hasil diskusi menjadi identifikasi yang

sifatnya menggabungkan hasil temuan kelompok-kelompok di kelas saudara. Kemudian laporkanlah secara tertulis kepada dosen pengasuh mata kuliah ini untuk kemudian didiskusikan secara lebih komprehensif dikaitkan dengan materi kuliah ini. Untuk hasil yang lebih maksimal saudara diberikan waktu 1 minggu dengan melakukan komparasi kajian dengan referensi/literature buku, makalah seminar, dll.

Daftar Pustaka

A. Sonny Kerap. 2005. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Buku Kompas

An Ubaedy. 2008. *Berkarir di Era Global*. PT Elex Media Komputindo, Jkt. Kelompok Gramedia.

Anna Poedjiadi. 2007. *Sains, Teknologi Masyarakat*. Rosdakarya. Bandung.

Anthony Giddens. 1991. *Modernity and Self Identity*. Polity Press.

Collins Marsh. 2008. *Studies of Society and Environment. Exploring The Teaching Possibilities*. Pearson Education Australia.

Gary Partington and Vince McCudden. 1992. *Ethnicity and Education*. Social Science Press.

George Ritzer and Douglas J Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. McGraw Hill.

Henry Soelistyo. 2011. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Kanisius. Yogyakarta.

Hilman Hadikusuma. 1989. *Masyarakat dan Adat - Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju.

Irianto, Sulistyo & Margaretha, Risma. 2011. *Piil Pesenggiri: Modal Budaya dan Strategi Identitas Ulun Lampung*. Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol 15(2).

Julia Maria. 1993. *Kebudayaan Orang Menggala*. Jakarta: UI Press

K. Bertens. 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Kenichi Ohmae. 2005. *The Next Global Stage: Tantangan dan Peluang di Dunia yang Tidak Mengenal Batas Kewilayahan*. PT Indeks. Kelompok Gramedia.

Larry P Nucci and Darcia Narvaes. 2008. *Handbook of Moral and Character Education*. Routledge 270 Madison Ave, New York.

Lawrence E. Harrison dan Samuel P. Huntington. 2006. *Kebangkitan Peran Budaya, Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*. Kerjasama Kedutaan Besar Amerika Serikat dengan LP3ES Jakarta.

Marshal Goldsmith, et.al. 2003. *Global Leadership: The Next Generation*. Pearson Education Inc. FT Prentice Hall.

Merry M Merryfield, et.al. 1977. *Preparing Teachers to Teach Global Perspectives*. Corwin Press Inc.

Robert Stardling, et.al. 1984. *Teaching Controversial Issues*. Edward Arnold (Publisher) Ltd.

Ronald Duska dan Mariellen Whelan. 1982. *Perkembangan Moral. Perkenalan dengan Piaget dan Kohlberg*. Kanisius. Yogyakarta.

Ronald W. Evans and David Warren Saxe. 1996. *Handbook On Teaching Social Issues*. National Council for The Social Studies (NCSS).

Samuel P. Huntington. 1996. *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order*. Alih Bahasa oleh M. Sadat ismail. Penerbit Qalam, Jakarta.

Saputro, CHC. 2011. *Piil Pesenggiri, Etos, dan Semangat Kelampungan*. Bandar Lampung: Jung Foundations Heritage dan Dinas Pendidikan.

Sayuti Ibrahim Kiay Paksi. 1995. *Buku Handak II. Mengenal Adat Lampung Pubian*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.

Suciati dan Prasetya Irawan. 2001. *Teori Belajar dan Motivasi*. Ditjen Dikti. PAU PPAI.

Suparmoko. 2008. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. BPFE Yogyakarta.

Thomas Lickhona. *Educating for Character: Mendidik untuk Membentuk Karakter*. Bumi Aksara.

UNESCO. 1996. *Learning The Treasure Within*. Report to UNESCO of The International Commision on Education for The Twenty-Sirst Century. UNESCO Publishing.

Universitas Lampung. 2016. Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Winfred F. Hill. *Theories of Learning. Teori-Teori Pembelajaran. Konsepsi, Komparasi, dan Signifikansi*. Nusa Media.

I Gede A.B Wiranata. 2005. *Dasar-dasar Etika dan Moralitas*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.

